

ANALISA KINERJA KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU)

Nur Rezkowati

¹Program Studi Manajemen, STIE Widya Darma Kotamobagu

Email: nur.rezkowati@gmail.com

ABSTRAK

Informasi keuangan sektor publik yang disajikan oleh pemerintah perlu diuji dengan konsep pengukuran kinerja keuangan sektor publik. Sebab semakin tinggi pelayanan terhadap publik maka semakin baik penilaian kinerja akuntansi sektor publik tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemerintah Kotamobagu. Metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif atau uraian tentang Analisa Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan sektor publik, Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan sektor publik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta penggunaan indikator *Value For Money* yaitu efektivitas dan Efisiensi. Belanja Daerah untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu Tahun 2019 pada Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp2.178.919.300,- dengan realisasi sejumlah Rp2.145.440.261,- dan belanja langsung sejumlah Rp16.950.196.874,- dengan realisasi sejumlah Rp15.291.911.863,-. Untuk nilai efektivitas berdasarkan data belanja daerah sebagai berikut Efektivitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 sebesar 98,46% dan Efektivitas Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar 90,22%. Sedangkan untuk nilai efisiensi Tahun 2019 adalah sebesar 112%. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan DPRD Kotamobagu baik sebagaimana tercermin pada nilai efektivitasnya.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Kinerja Keuangan Sektor Publik

PENDAHULUAN

Praktek akuntansi sektor publik mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang membahas tentang penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah laporan keuangan serta penilaian kinerja keuangan pemerintahan. Informasi yang dihasilkan dari penyajian laporan keuangan sektor publik ini menggambarkan kegiatan pengelolaan dana atau keuangan publik. Informasi keuangan sektor publik yang disajikan oleh pemerintah perlu diuji lagi dengan konsep pengukuran kinerja keuangan

sektor publik itu sendiri. Dengan kata lain, kinerja pemerintahan dari sisi laporan keuangan menjadi sorotan penting untuk dilakukan pengukuran. Dengan semakin tinggi pelayanan terhadap publik maka semakin baik penilaian kinerja akuntansi sektor publik tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu. Sehingga manfaat yang diperoleh yaitu memberikan masukan yang berarti bagi pihak perusahaan terutama mengenai Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Kantor

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu guna pengembangan praktek manajemen pemerintahan ke depan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Ardiyos (2016:5) mendefinisikan akuntansi sebagai profesi yang memakai teori tertentu, asumsi mengenai cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan suatu organisasi. **Mardiasmo (2009:1)** mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi Badan-Badan Pemerintahan (Pemerintah Pusat, dan Daerah serta Unit Kerja Pemerintah), perusahaan milik Negara (Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah), Yayasan, Organisasi Politik dan Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. **Mardiasmo (2009:123)** menyatakan bahwa informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain yaitu informasi finansial dan informasi non finansial. **Mardiasmo (2009:133)** mengemukakan bahwa indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika program

efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan *cost effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif atau uraian tentang Analisa Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Organisasi pemerintahan yang merupakan bagian dari organisasi nirlaba membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar untuk mengukur kinerja kegiatan dalam satu periode anggaran. Informasi akuntansi ini harus dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga laporan kinerja yang akan disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu sebagai salah satu organisasi bidang Pemerintahan Daerah yang memiliki berbagai kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan membutuhkan penggunaan konsep pengukuran kinerja keuangan sektor publik dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government) di lingkungan organisasi ini. Berkaitan dengan itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu tentunya dalam menunjang kegiatannya melakukan

serangkaian rencana strategis untuk mencapai sasaran kinerja keuangan yang baik.

A. Data Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu

1. Sistem pengukuran kinerja keuangan sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dalam sektor publik. Sistem ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan konsep *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja keuangan sektor publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu mengikuti konsep sistem akuntansi sektor publik. Berikut ini akan diuraikan data keuangan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu Tahun 2019:

a. Anggaran:

- 1) Belanja Tidak langsung
 - a) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)/uang representasi dengan anggaran Rp1.028.061.900,-.
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga dengan anggaran Rp78.167.800,-.
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan dengan anggaran Rp118.489.500,-.
 - d) Belanja Tunjangan Fungsional Umum dengan anggaran Rp31.363.000,-.

- e) Belanja Tunjangan Beras dengan anggaran Rp50.896.800,-.
 - f) Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Kusus dengan anggaran Rp7.598.200,-.
 - g) Belanja Pembulatan Gaji dengan anggaran Rp20.800,-.
 - h) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan anggaran Rp201.600.000,-.
 - i) Belanja tambahan penghasilan PNS dengan anggaran Rp662.721.300,-.
- 2) Belanja Langsung
- a) Program Pelayanan Adm. Perkantoran dengan anggaran Rp4.625.438.200,-.
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp5.679.621.450,-.
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp285.400.000,-.
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur I dengan anggaran Rp182.950.000,-.
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur II dengan anggaran Rp9.438.617.500,-.
 - f) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp751.297.000,-.

b. Realisasi:

- 1) Penerimaan Jasa Giro :
Rp155.455,-
- 2) Belanja Tidak langsung
- a) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)/uang representasi dengan realisasi sebesar Rp1.020.095.250,-.
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga dengan realisasi sebesar Rp76.622.375,-.
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan dengan realisasi sebesar Rp117.585.000,-.
 - d) Belanja Tunjangan Fungsional Umum dengan realisasi sebesar Rp30.940.000,-.
 - e) Belanja Tunjangan Beras dengan realisasi sebesar Rp49.607.700,-.
 - f) Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Kusus dengan realisasi sebesar Rp7.235.006,-.
 - g) Belanja Pembulatan Gaji dengan realisasi sebesar Rp16.968,-.
 - h) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan realisasi sebesar Rp201.600.000,-.
 - i) Belanja tambahan penghasilan PNS dengan realisasi sebesar Rp641.737.962,-.
- 3) Belanja Langsung
- a) Program Pelayanan Adm. Perkantoran dengan realisasi sebesar Rp4.164.647.342,-.
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi sebesar Rp4.538.060.195,-.
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi sebesar Rp239.716.400,-.
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur I dengan realisasi sebesar Rp170.989.500,-.
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur II dengan realisasi sebesar Rp9.153.973.516,-.
 - f) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp233.663.800,-.
- B. Kinerja Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyajian belanja dan pengeluaran dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019

A	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Belanja Tidak langsung	2.178.919.300	2.145.440.261	98,46	33.479.039

2.	Belanja Langsung	16.950.196.874	15.291.911.863	90,22	1.658.285.011
	1) Program Pelayanan Adm. Perkantoran	4.625.438.200	4.164.647.342	90,04	460.790.858
	2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.679.621.450	4.538.060.195	79,90	1.141.561.255
	3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	285.400.000	239.716.400	83,99	45.683.600
	4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur I	182.950.000	170.989.500	93,46	11.960.500
	5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur II	9.438.617.500	9.153.973.516	96,98	284.643.984
	6) Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	751.297.000	233.663.800	31,10	517.633.200

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu, 2019.

Belanja Daerah untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu Tahun 2019 pada Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp2.178.919.300,- dengan realisasi sejumlah Rp2.145.440.261,- atau 98,46% terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)/uang representasi dengan anggaran Rp1.028.061.900,- dengan realisasi sebesar Rp1.020.095.250,- atau 99,22%.
- b. Belanja Tunjangan Keluarga dengan anggaran Rp78.167.800,- dengan realisasi sebesar Rp76.622.375,- atau 98,02%.
- c. Belanja Tunjangan Jabatan dengan anggaran Rp118.489.500,- dengan realisasi sebesar Rp117.585.000,- atau 99,24%.
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Umum dengan anggaran Rp31.363.000,- dengan realisasi sebesar Rp30.940.000,- atau 98,65%.

e. Belanja Tunjangan Beras dengan anggaran Rp50.896.800,- dengan realisasi sebesar Rp49.607.700,- atau 97,47%.

f. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Kusus dengan anggaran Rp7.598.200,- dengan realisasi sebesar Rp7.235.006,- atau 95,22%.

g. Belanja Pembulatan Gaji dengan anggaran Rp20.800,- dengan realisasi sebesar Rp16.968,- atau 82,58%.

h. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan anggaran Rp201.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp201.600.000,- atau 100%.

i. Belanja tambahan penghasilan PNS dengan anggaran Rp662.721.300,- dengan realisasi sebesar Rp641.737.962,- atau 96,83%.

Selanjutnya, untuk nilai efektivitas berdasarkan data belanja daerah di atas dapat diketahui sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

Sehingga diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:

Efektivitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp}2.145.440.261}{\text{Rp}2.178.919.300} = 0,9846 \times 100\% = 98,46\%$$

Efektivitas Belanja Langsung Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp}15.291.911.863}{\text{Rp}16.950.196.874} = 0,9022 \times 100\% = 90,22\%$$

Sedangkan nilai efisiensi untuk kinerja keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu Tahun 2019 diukur dengan membandingkan nilai belanja daerah (*output*) dan pendapatan (*input*).

Nilai *output* merupakan nilai belanja yang dilakukan organisasi selama periode Tahun 2019 yaitu total belanja langsung dan belanja tidak langsung (Rp2.145.440.261 + Rp15.291.911.863 = Rp17.437.352.124) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Sehingga diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2019} = \frac{\text{Rp}17.437.352.124}{\text{Rp}155.455} = 112,169 \times 100\% = 112\%$$

Adapun nilai efisiensi ini dinilai sudah terlalu besar jika dibandingkan antara belanja daerah dengan nilai pendapatan yang sebenarnya sangat sedikit diperoleh pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu. Untuk itu, pengukuran efisiensi Tahun 2019 dinyatakan nilai *output* (belanja daerah) lebih besar dibandingkan dengan nilai *input* (pendapatan) atau relatif tidak efisien.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan sektor publik, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta penggunaan indikator *Value For Money* yaitu efektivitas dan Efisiensi. Belanja Daerah untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu Tahun 2019 pada Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp2.178.919.300,- dengan realisasi sejumlah Rp2.145.440.261,- dan belanja langsung sejumlah Rp16.950.196.874,- dengan realisasi sejumlah Rp15.291.911.863,-. Untuk nilai efektivitas berdasarkan data belanja daerah sebagai berikut

Efektivitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar 98,46% dan Efektivitas Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar 90,22%. Sedangkan untuk nilai efisiensi Tahun 2019 adalah sebesar 112%. Untuk itu, pengukuran efisiensi Tahun 2019 dinyatakan nilai *output* (belanja daerah) lebih besar dibandingkan dengan nilai *input* (pendapatan) atau relatif tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos, 2016, **Kamus Standar Akuntansi**, Penerbit : Citra Harta Prima – Jakarta
- Firdaus A. Dunia, 2008, **Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – Jakarta
- Indra Bastian, 2010. **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**. Erlangga – Jakarta
- Irham Fahmi, 2011. **Analisis Kinerja Keuangan**. BPFE – Yogyakarta
- L. Samryn, 2014, **Pengantar Akuntansi**. Rajawali Pers – Jakarta
- Mahmudi, 2007. **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. UPP AMPYKPN – Yogyakarta
- Mahsun, Moh.; Sulistiyowati, Firma;. Purwanugraha, Heribertus A, 2016. **Akuntansi Sektor Publik**. BPFE – Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi – Yogyakarta
- Novi Priyati, 2016. **Pengantar Akuntansi**. Indeks – Jakarta
- Sofyan Syafri Harahap, 2015, **Teori Akuntansi**. PT. Raja Grafindo Persada – Jakarta
- Sugiyono, 2016. **Metode Penelitian Kuantitatif dab R&D**. Alfabeta – Bandung
- Suwardjono, 2014. **Akuntansi Pengantar**. BPFE – Yogyakarta
- V. Wiratna Sujarweni, 2016. **Pengantar Akuntansi**. Pustaka Baru Press – Yogyakarta
- V. Wiratna Sujarweni, 2014. **Metodologi Penelitian**. Pustaka Baru Press – Yogyakarta